

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam membangun pemikiran suatu bangsa. Ditelisik dalam kajian historisnya, pendidikan di Indonesia melalui tiga fase yaitu masa tradisional, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Dalam setiap fase tersebut tentunya sistem pendidikan yang digunakan berbeda-beda. Pengaruh masuknya bangsa Barat ke Indonesia menyebabkan dampak yang cukup besar terhadap pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini bahwa Pemerintah kolonial Belanda memiliki dampak yang positif untuk memajukan peradaban bangsa Indonesia. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah kolonial Belanda ini juga mengarah ke sistem pendidikan barat.

Pada awal abad ke-19, mulai adanya pemikiran untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak pribumi untuk mendidik tenaga yang akan mengisi jabatan-jabatan pemerintah, terutama di kantor residen.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan adanya kebutuhan tenaga kerja dan pegawai yang terampil dan terdidik semakin meningkat. Usaha memperoleh pendidikan bermula dari diselenggarakannya secara tidak resmi oleh Pemerintah Kolonial, tetapi dengan perorangan (swasta). Murid-murid diambil dari anak-anak orang terkemuka setempat. Usaha mengembangkan pendidikan mendapat tanggapan positif dari bupati-bupati dan

---

<sup>1</sup>Sartono Kartodirdjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 23.

para pangrehpraja karena kantor pemerintahan yang dirasa membutuhkan pegawai.<sup>1</sup>

Pada paruh pertama abad ke-19, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1816 Pemerintah kolonial Belanda membentuk Komisariss Jendral dengan tujuan untuk memperlancar roda pemerintahan. Mulai dari sinilah Pemerintah kolonial Belanda mulai memperhatikan setiap aspek, salah satunya pendidikan. Namun, pendidikan ini hanya merujuk pada anak-anak Eropa saja. Pada tanggal 24 Februari 1817 di Batavia dibuka sekolah pertama bagi anak-anak Belanda yaitu ELS (*Europese Lagere School*) yang setara dengan sekolah dasar dengan masa sekolah 7 tahun. Sekolah serupa juga didirikan di setiap daerah asal jumlah muridnya mencapai 20 di Jawa dan 15 di Luar Jawa.<sup>2</sup> Pada tahun 1860 juga didirikan Sekolah Gymnasium III yang setara dengan SMA (Sekolah Menengah Atas). Sekolah ini juga mengalami perluasan hingga ke Surabaya dengan nama HBS (*Hoogere Burger School*) yang bertempat di Jalan Baliwerti berdekatan dengan daerah Alun-Alun Contong<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sumarsono Mestoko, *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 74.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*. (Tanpa Tempat Terbit: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985-1986), hlm. 126-127.

<sup>3</sup>Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri, "Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901-1942", *Jurnal Publika Budaya*, Volume 1 No.3, Maret 2015, hlm. 21.

Sejatinya pada masa pemerintahan kolonial Belanda, di Indonesia sudah terdapat sekolah-sekolah untuk kalangan bumiputera. Tetapi fasilitas sekolah yang didapat tidak sepadan dengan sekolah bagi anak-anak Belanda. Hal tersebut memunculkan polemik bagi anggota parlemen Kolonial Belanda. Van Deventer yang merupakan salah satu anggota parlemen berpendapat, pemerintah kolonial tidak seharusnya mengesampingkan jasa dari penduduk jajahannya. Dengan kata lain, Negeri Belanda telah berhutang budi kepada penduduk Indonesia. Usul yang disampaikan tersebut kemudian dikenal dengan nama Politik Etis.<sup>4</sup>

Politik Etis (*ethisce politic*), yang terdiri dari edukasi, migrasi, dan irigasi.<sup>5</sup> Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab bagi kesejahteraan penduduk Indonesia.

Pendidikan yang merupakan salah satu poin penting dari politik etis ini mulai mengalami perubahan sejak diterapkannya pada tahun 1901. Pada awal abad ke-20, telah ada banyak sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial yang tersebar di seluruh Hindia Belanda tak terkecuali di Bojonegoro. Terlebih

---

<sup>4</sup>Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 73.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*" (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 63.

lagi Bojonegoro menjadi pusat pemerintahan Residensi Bojonegoro yang membawahi kabupaten Bojonegoro dan Tuban.<sup>6</sup>

Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah Karesidenan Rembang. Sejak awal pemerintahan kolonial Belanda, Bojonegoro dikembangkan menjadi pusat pemerintahan dan pusat industri perkebunan seperti tebu, tembakau, jagung, kapuk dan lain sebagainya. Selain menjadi pusat industri pertanian, Bojonegoro juga memiliki pertambangan minyak bumi yang menjadi industri seperti halnya di wilayah Cepu. Bojonegoro menjadi wilayah dengan penduduk Eropa yang cukup banyak, sehingga fasilitas pendidikan juga diperlukan bagi anak-anak Eropa yang berada di wilayah tersebut.

Berdasarkan *Memorie van Overgave* (MvO) Residen Rembang J.F Hilderling (1921-1924), pada tahun 1900, di Bojonegoro telah ada satu sekolah Eropa (*Europeesche Lagere School*). Pendidikan yang diselenggarakan di Bojonegoro, oleh pemerintah kolonial Belanda bertujuan untuk memperoleh sumber daya manusia yang nantinya akan dijadikan sebagai tenaga kerja, tenaga administrasi pada perusahaan dan di bidang perkebunan, baik itu dari kalangan Eropa maupun kalangan bumiputera. Adanya sekolah tersebut juga melahirkan tokoh elit intelektual yang nantinya menjadi penggerak bangsanya dalam

---

<sup>6</sup>Sejak 1 Juli 1928 kabupaten Bojonegoro keluar dari Karesidenan Rembang hingga tahun 1931 dan kemudian menjadi bagian dari Karesidenan Gresik bersama dengan Lamongan, dan Tuban. Adapun Kabupaten Bojonegoro meliputi distrik Bojonegoro, distrik Baureno, distrik Pelem, distrik Tambakrejo, distrik Padangan, dan distrik Ngumpak. Lihat C.L.M. Panders, "*Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North-East Java*", Indonesia (Jakarta: PT. Inti Rahayu, 1984), hlm. 3.

melawan kekuasaan kolonial. Selain itu, adanya sekolah untuk anak-anak Eropa ini juga diharapkan sedikit banyak memberi pengaruh bagi kehidupan masyarakat di Bojonegoro baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan permasalahan yaitu,

1. Bagaimana penyelenggaraan sekolah rendah Eropa di Bojonegoro pada tahun 1892-1942?
2. Bagaimana kontribusi sekolah rendah Eropa di Bojonegoro terhadap munculnya elit intelektual bumiputera?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan mengenai penyelenggaraan sekolah rendah Eropa di Bojonegoro sepanjang tahun 1892 sampai dengan tahun 1942 hingga munculnya elit intelektual bumiputera. Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam sejarah sosial yang mengambil spesifikasi tentang pendidikan, khususnya sekolah rendah untuk anak-anak Eropa yang terdapat di Bojonegoro. Hal ini dikarenakan terdapat orang-orang Eropa di Bojonegoro yang mendorong didirikannya sekolah bagi anak-anak mereka, yang secara tidak langsung diharapkan dapat melanjutkan pemerintahan maupun perusahaan milik Belanda yang ada wilayah tersebut. Penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat akan adanya pendidikan barat yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan penduduk di Bojonegoro.

Sementara itu secara historiografis, penelitian ini secara umum untuk memberi sumbangan historiografi lokal mengenai kajian sejarah sosial tepatnya tentang pendidikan untuk anak-anak Eropa di Bojonegoro pada masa pemerintahan kolonial Belanda hingga lahirnya elit baru intelektual bumiputera. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya tulisan tentang sejarah kabupaten Bojonegoro. Dengan demikian setidaknya bagi pembaca hasil penelitian ini dapat memperoleh sedikit wawasan tentang pendidikan untuk anak-anak Eropa yang ada di Bojonegoro pada masa kolonial Belanda.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penulisan sejarah perlu adanya pembatasan spasial dan temporal bertujuan agar penulis lebih fokus dalam menangkap suatu permasalahan karena di setiap peristiwa pasti akan mengalami perubahan bentuk.<sup>7</sup> Batasan dalam penelitian ini mengenai penyelenggaraan sekolah Eropa yaitu ELS (*Europesche Lagere School*) hingga munculnya elit intelektual bumiputera di Bojonegoro. Pemilihan wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai fokus penelitian ini karena Bojonegoro yang merupakan wilayah yang kecil bagian dari wilayah Karesidenan Rembang dan memiliki jumlah penduduk Eropa yang relatif banyak tentunya memerlukan adanya fasilitas pendidikan.

---

<sup>7</sup>Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wicana, 2008), hlm.15

Selanjutnya adalah batas temporal awal tulisan ini adalah tahun 1892-1942. Berdasarkan *Algemeen Verslag van Het Middelbaar en Lager Onderwijs voor Europeanen en Met Dezen Gelijkgestelden in Nederlandsch-Indie over 1892*, telah dibuka ELS (*Europeesche Lagere School*) di Bojonegoro. Kemudian batasan akhir tahun 1942, karena pada tahun tersebut adalah tahun dimana berakhirnya masa penjajahan pemerintah kolonial Belanda yang kemudian digantikan dengan pemerintahan Jepang. Pergantian ini sedikit banyak merubah wajah sekolah peninggalan kolonial Belanda. Salah satunya *Volkschool* di Kalitidu, Bojonegoro berubah nama menjadi *Kokumin Gakko*. Adapun sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan kepada keperluan kemenangan perang Asia Timur Raya.<sup>8</sup>

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Kajian sejarah mengenai pendidikan di Indonesia masih sangat sedikit jumlahnya bahkan bisa dikatakan langka. Hal ini dikarenakan sedikitnya sejarawan di Indonesia yang tertarik untuk meneliti dan menulis sejarah dengan tema pendidikan. Dari banyaknya permasalahan maupun objek penelitian yang terdapat di Indonesia, tulisan sejarah dengan tema pendidikan merupakan salah satu jenis tema yang paling sedikit diminati oleh para sejarawan untuk diteliti. Begitupun dengan pendidikan yang ada di Bojonegoro.

---

<sup>8</sup>Panitia Penggali dan Penyusun Sejarah Hari-Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, "*Sejarah Kabupaten Bojonegoro Menyingkap Kehidupan dari Masa ke Masa*", (Bojonegoro: CV.Monalisa, 1988), hlm. 194-195.

Meski dengan sedikitnya kajian sejarah yang membahas tentang pendidikan yang ada di Bojonegoro ini, ada beberapa literatur di internet yang secara singkat menggambarkan bagaimana kondisi pendidikan yang ada di Indonesia pada masa kolonial, namun tidak di khusukan di Bojonegoro. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis melakukan perbandingan antara kajian-kajian yang telah ada dengan kajian yang sedang diteliti penulis untuk melihat keotentikannya.

Penelitian mengenai sejarah Bojonegoro telah di tulis oleh C.L.M Penders dalam bukunya yang berjudul *Bojonegoro 1900-1942 A Story of Endemic Poverty in North-East Java-Indonesia*.<sup>9</sup> Secara garis besar buku dari Penders tersebut membahas tentang politik etis yang berlaku di Bojonegoro. Pada bab keempat membahas tentang pendidikan di Bojonegoro sudah banyak sekolah-sekolah yang didirikan diantaranya seperti *Eerste Klasse School*, *Tweede Klasse School*, sekolah-sekolah desa, *ELS*, *HIS*, sekolah khusus untuk putri dan satu sekolah dagang. Namun Penders menilai bahwa pelaksanaan politik etis di bidang pendidikan di Bojonegoro kurang intens dibandingkan dengan yang ada di wilayah lain.

Jadi, dalam buku ini banyak menguraikan tentang kebijakan politik etis dengan tiga pokok bidang yaitu irigasi, migrasi, dan edukasi secara umum di Bojonegoro. Uraian tentang pendidikan dalam buku Penders tersebut masih

---

<sup>9</sup>C.L.M Penders, *Bojonegoro 1900-1942 A Story of Endemic Poverty in North-East Java-Indonesia* (Jakarta: PT. Inti Rahayu, 1984)

terbatas pada perkembangan pendidikan rendah secara umum. Namun setidaknya buku tersebut menjadi acuan penulis untuk mengetahui dasar tentang perkembangan pendidikan di Bojonegoro.

Buku selanjutnya ialah, buku yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro yang berjudul *Sejarah Kabupaten Bojonegoro Menyingkap Kehidupan dari Masa ke Masa*.<sup>10</sup> Buku ini menguraikan tentang sejarah Kabupaten Bojonegoro mulai dari masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Buku yang disusun oleh Panitia Penggali dan Penyusun Sejarah Hari-Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro ini menjelaskan secara detail bagaimana perkembangan kabupaten Bojonegoro dari masa ke masa. Namun dalam buku tersebut tidak banyak menyinggung masalah pendidikan yang ada di Bojonegoro. namun setidaknya buku tersebut bisa dijadikan untuk menjadi bahan dalam penulisan ini.

Buku lain yang berkaitan adalah buku karya Nasution, yaitu *Sejarah Pendidikan Indonesia*.<sup>11</sup> Buku ini secara umum membahas tentang perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Lebih lengkapnya dalam buku tersebut menguraikan pula mengenai kurikulum pelajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah tinggi. Begitu pula dijelaskan

---

<sup>10</sup>Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, “*Sejarah Kabupaten Bojonegoro Menyingkap Kehidupan dari Masa ke Masa*” (Bojonegoro: CV. Monalisa), 1988

<sup>11</sup>S. Nasution. *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara), 2008.

mengenai tenaga pengajar sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Selain itu juga memuat data-data jumlah siswa yang masuk ke sekolah-sekolah secara umum di Indonesia baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah tinggi. Namun buku ini tidak menyinggung sama sekali mengenai sekolah yang ada di Bojonegoro.

Selanjutnya buku dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*.<sup>12</sup> Dalam buku tersebut dijelaskan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia mulai dari masa kerajaan hingga masa pasca kemerdekaan. Banyak pula menguraikan tentang pendidikan yang ada di Indonesia mulai dari jenis-jenis sekolah, asas dan tujuan adanya pendidikan yang berkembang di Indonesia. Meskipun demikian, dalam buku ini tidak menyinggung sama sekali mengenai pendidikan di Bojonegoro.

Buku lain yang berkaitan dengan pendidikan adalah *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*.<sup>13</sup> Dalam buku ini menguraikan mengenai pendidikan yang ada di Daerah Jawa Timur, namun tidak disebutkan secara detail mengenai penyebarannya. Selanjutnya ada buku *Sejarah Sekolah Makasar: Di Tengah Kolonialisme, Pertumbuhan Pers, dan Pembentukan Elit Baru Periode 1876-1942*

---

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman* (Jakarta: Balai Pustaka), 1986

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur* (Tanpa Tempat Terbit: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Investarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985-1986).

oleh Sarkawi B. Husain.<sup>14</sup> Buku ini secara keseluruhan menguraikan tentang pendidikan yang ada di Makassar, mulai dari pendidikan tradisional hingga pendidikan model Barat. Buku ini menguraikan berbagai jenis sekolah seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah kejuruan yang ada di Makassar pada masa kolonial. Selain itu, dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana perkembangan sekolah-sekolah yang ada di Makassar di tengah bangkitnya kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia, sehingga kemudian berpengaruh pula terhadap adanya organisasi-organisasi pergerakan dan lain sebagainya.

### **1.6 Landasan Konseptual**

Salah satu yang harus diperhatikan dalam penulisan sejarah adalah penggunaan konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial yang dipergunakan untuk menentukan konsep, teori, permasalahan dan pendekatan.<sup>15</sup> Pendekatan itu sendiri adalah cara menyusun data berdasarkan konsep dan teori dari ilmu pengetahuan sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan lain-lain. Dalam penulisan yang berjudul “*Europeesche Lagere School* in Bojonegoro: Penyelenggaraan Hingga Munculnya Elit Intelektual Bumiputera tahun 1892-1942” menggunakan konsep stratifikasi sosial di masyarakat. Kajian ini akan membahas adanya kontribusi dari sebuah institusi pendidikan yang dapat

---

<sup>14</sup>Sarkawi B. Husain, *Sejarah Sekolah Makassar: Ditengah Kolonialisme, Pertumbuhan Pers, dan Pembentukan Elit Baru Periode 1876-1942* (Makassar: Innawa, 2015)

<sup>15</sup> Kuntowijoyo, “*Pengantar Ilmu Sejarah*”, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013), hlm. 87

mendorong adanya perubahan sosial bagi masyarakat Bojonegoro. Munculnya stratifikasi sosial di masyarakat adalah hasil dari hubungan yang terjadi antar manusia dalam bermasyarakat yang menyebabkan setiap orang mempunyai status sosial. Dimana setiap manusia atau individu itu sendiri digolongkan dari status sosial yang rendah hingga status sosial yang tinggi.

Pendidikan yang berkembang pada masa kekuasaan Belanda dibagi menjadi dua yaitu, pendidikan formal dan non formal, baik itu didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda maupun swasta. Menurut Pitirim A. Sorokin, lembaga pendidikan dapat disebut sebagai sosial elevator. Hal ini dikarenakan sebuah lembaga pendidikan menjadi jalur saluran dari gerak sosial yang vertikal, mulai dari status sosial yang rendah hingga ke status sosial yang tinggi dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Dari pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda, pendidikan yang berorientasi baratlah yang idamkan masyarakat. Masyarakat berpandangan, jika anak-anak yang bersekolah di sekolah yang berpendidikan barat maka mereka mampu menaikkan status sosial mereka. Selain itu, pendidikan barat tersebut nantinya akan melahirkan elit intelektual serta tenaga terdidik yang akan menduduki jabatan dalam pemerintahan kolonial Belanda. Merujuk pada pendapat Keller, dimana kaum elit adalah minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab.

---

<sup>16</sup>Soeryono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 247.

Sementara itu, Alatas (1988), berpendapat bahwa seorang intelektual adalah orang yang memusatkan diri untuk memikirkan ide dan masalah non-material dengan kemampuan penalaran yang dimilikinya. Kaum intelektual menunjukkan ciri-ciri antara lain; *pertama*, mereka direkrut dari segala kelas, sekalipun dalam proporsi yang berbeda. *Kedua*, mereka dijumpai dikalangan pendukung atau penentang dari berbagai gerakan kebudayaan dan politik. *Ketiga*, jika dilihat dari sudut pandang pekerjaan, mereka pada umumnya bukanlah pekerja tangan karena sebagian besar dari mereka menjadi guru atau pengajar, dosen, wartawan, dan lain sebagainya. *Keempat*, kelompok intelektual senantiasa merupakan bagian kecil dari masyarakat itu sendiri.<sup>17</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang historisnya, perkembangan elit intelektual di Indonesia, Dawam Rahardjo menegaskan bahwa munculnya bersamaan dengan lahirnya kesadaran kebangsaan dan kebangkitan nasional. Dimana mereka pada mulanya merupakan orang-orang yang mendapatkan pendidikan barat (kolonial Belanda).<sup>18</sup> Pendidikan barat yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar, pada awalnya hanya ditunjukkan untuk anak-anak Eropa dan bumiputera kalangan atas. Hal ini karena golongan Eropa tidak mau disejajarkan dengan golongan bumiputera. Secara finansial hanya golongan Eropa serta bumiputera kalangan atas lah yang mampu membayar biaya sekolah yang tinggi.

---

<sup>17</sup>Syed Husain Alatas, *Intelektual Masyarakat Berkembang*, (Jakarta: LP3ES, 1988) hlm. 12-13.

<sup>18</sup>M. Darwam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Bangsa*, (Yogyakarta: Penerbit Mizan, 1993), hlm. 66.

Selain itu, syarat utama untuk dapat memasuki sekolah tersebut adalah memiliki pengetahuan tentang bahasa Belanda. Sekolah bercorak barat ini juga terbatas bagi anak perempuan. Hal ini dikarenakan, sejatinya anak perempuan hanya melakukan pekerjaan rumah sehingga tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi.

Pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk membangun peradaban melalui perkembangan manusia. Pendidikan yang merupakan hak setiap orang untuk meningkatkan harkat dan martabatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya perkembangan di bidang pendidikan menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial karena berdampak pada perubahan stratifikasi sosial masyarakat.

Pendidikan yang berkembang pada masa pemerintahan kolonial Belanda merupakan salah satu bentuk modernisasi masyarakat. Masyarakat yang awalnya tradisional menjadi masyarakat yang modern. Meningkatnya literasi dan pengetahuan, serta munculnya sektor pekerjaan baru yang memerlukan sebuah ketrampilan. Tujuan dari pendidikan barat ini yang nantinya mengisi sektor pekerjaan baru tersebut. Selain itu, adanya pendidikan barat ini juga melahirkan golongan elit intelektual yang akan merubah cara pandang masyarakat agar terlepas dari belenggu penjajah.

### **1.7 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Adapun penelitian yang dilakukan dimulai dari langkah-langkah pemilihan topik, pengumpulan

sumber, kritik sumber (vertifikasi), dan interpretasi, analisis serta penyajian dalam bentuk penulisan (historiografi).<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, penulis memilih topik pembahasan sekolah rendah untuk anak-anak Eropa yang dikhususkan di Bojonegoro pada tahun 1892-1942 dikarenakan masih minimnya literatur ataupun tulisan yang membahas tentang topik tersebut.

Pertama adalah heuristik. Heuristik dalam bahasa Yunani disebut sebagai *Heuriskin*, yang artinya *to find* atau menemukan. Heuristik merupakan suatu proses pencarian sumber-sumber sejarah yang diperlukan dalam sebuah penelitian sejarah, baik itu berupa sumber primer maupun sumber sekunder.<sup>20</sup> Dalam penelitian sejarah sumber-sumber tersebut dapat berupa dokumen, koran, sumber lisan, artefak, dan lain-lain. Sumber primer merupakan sumber yang berupa arsip, dokumen, atau sumber lisan dari pelaku sejarah. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber penunjang yang diperoleh dari buku maupun koran yang sezaman.

Sumber primer ini diperoleh dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan BAPPEDA (Badan Pembangunan Daerah) Jawa Timur. Sedangkan sumber sekunder dapat ditemui di perpustakaan. Sejauh ini sumber primer yang ditemukan penulis berupa *Statblaad van Nederlands Indie* mengenai peraturan-peraturan pendidikan kolonial, *Memorie Van Overgave (MoV)*, *Algemeen Verslag*

---

<sup>19</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 64.

<sup>20</sup>Sarkawi B. Husain, *Metode Sejarah: Pemilihan Topik, Sumber, dan Kritik Sumber*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2002), Diktat tidak diterbitkan, hlm. 29.

*van Het Middelbaar en Lager Onderwijs voor Europeanen en met Dezen Gelijkdestelden in Nederlandsch-Indie dan Publicatie Hallandsch-Inlandsch Onderwijs Commissie.*

Kemudian sumber sekunder yang ditemui berupa surat kabar lokal yang terbit sezaman terkait seperti *De Indische Courant*, *Het Nieuws Van Den Dag*, dan *Soerabaiasche Handelsblad*. Sumber sekunder tersebut banyak diperoleh dari situs delpher.nl. Kemudian untuk sumber tersier sebagai pendukung yang berupa buku, jurnal dan penelitian terdahulu lainnya yang menyinggung masalah pendidikan diperoleh dari Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga, Perpustakaan Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga serta Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Kedua adalah kritik sumber. Sumber sejarah yang telah dikumpulkan baik dari sumber primer maupun sumber sekunder tidak serta merta dapat digunakan dalam penulisan sejarah. Sumber tersebut harus diverifikasi. Kritik sumber atau verifikasi dibagi menjadi dua yaitu, autetisitas atau keaslian sumber yang merupakan kritik ekstern, dan kredibilitas atau kebiasaan yang merupakan kritik ekstern.<sup>21</sup>

Tujuan dari kritik ekstern adalah keotentikan suatu sumber yang diperoleh merupakan dokumen asli yang dikeluarkan oleh orang atau suatu organisasi maupun badan yang berwenang. Sedangkan kritik intern dilakukan untuk meneliti keterangan yang terdapat dalam dokumen atau naskah tersebut dapat dipercaya.

---

<sup>21</sup>Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 77.

Kritik intern dapat dilakukan dengan cara menguji keaslian sumber sejarah dengan membandingkan dokumen atau naskah yang ditemukan dengan dokumen lain yang sezaman. Selain itu, kritik intern juga dapat dilakukan dengan mengamati tanggal dan lokasi pembuatan dokumen, analisis, integritas, dan kredibilitas.

Ketiga adalah interpretasi. Pada tahap ini, penulis mencari keterkaitan atau hubungan dari berbagai sumber yang telah ditemukan. Dalam menginterpretasikan sumber sejarah dibagi menjadi dua yaitu, analisi dan sintesis.<sup>22</sup> Analisi adalah menguraikan, hal ini terjadi karena beberapa sumber sejarah mengandung beberapa kemungkinan. Sedangkan sintesis adalah menyatukan berbagai sumber sejarah.

Keempat adalah penulisan sejarah. Tahap terakhir yang berupa penyusunan fakta-fakta dalam suatu sintesa dan disusun dengan menggunakan teknik penulisan sejarah.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam menuliskan kajian penelitian ini sehingga dapat tersusun secara sistematis dan kronologis maka disusunlah sistematika penulisan, langkah-langkah penulisan sebagai berikut:

BAB I : yaitu pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan dan ruang

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 78-79.

lingkup penelitian, tinjauan pustaka, landasan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : yaitu kondisi Bojonegoro pada paruh pertama abad ke-20 yang meliputi masa politik etis di Bojonegoro, kondisi geografi Bojonegoro, kondisi sosial-demografi masyarakat Bojonegoro dan kondisi umum sekolah yang ada di Bojonegoro.

BAB III: yaitu menjelaskan tentang penyelenggaraan sekolah rendah Eropa yang ada di Bojonegoro tahun 1892 hingga 1942 yang dibagi ke dalam beberapa sub-bab. Pertama, menjelaskan penyelenggaraan sekolah rendah Eropa di Bojonegoro, dan sub-bab selanjutnya membahas tentang munculnya elit intelektual bumiputera yang merupakan alumni dari *Europeesche Lagere School* di Bojonegoro.

BAB IV : yaitu penutup atau kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai sekolah rendah Eropa yang ada di Bojonegoro pada tahun 1892-1942.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN